RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig

AKD: RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig

Bulan: Februari 2026

Oleh: RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

- Istilah gig lahir bukan dari ruang rapat para ekonom, melainkan dari panggung musik jazz Amerika pada dekade 1920-an. Bagi musisi jazz waktu itu, sebuah gig berarti satu kali pertunjukan, sebuah engagement singkat untuk menghibur penonton. Kemudian istilah gig meluas. Dari musik ke dunia hiburan, lalu ke kerja lepas, hingga akhirnya menjadi istilah global yang kita kenal hari ini—gig workers atau pekerja gig Mereka adalah pekerja yang hidup dari tugas-tugas pendek, kontrak lepas, fleksibel, dan sering kali difasilitasi oleh platform digital.
- Di Indonesia, gig workers atau pekerja lepas hadir dalam wujud pengemudi ojek daring atau ojol, kurir logistik, penjual jasa di platform digital, hingga kreator konten yang hidup dari engagement publik. Fenomena ini membawa wajah baru dunia kerja lebih cair, lebih mandiri, tetapi juga lebih rapuh. Gig economy membuka peluang bagi jutaan orang, tetapi sekaligus memperlihatkan celah besar dalam perlindungan sosial dan kepastian hukum.
- Ekonomi gig adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem kerja yang melibatkan kontrak jangka pendek dan pekerjaan lepas, sering kali difasilitasi oleh platform digital. Dalam konteks ini, pekerja dapat menawarkan layanan mereka secara independen, sementarapengusahadapatmencaritenagakerjasesuaikebutuhanmerekatanpaharus melakukan perekrutan permanen.
- Ekonomi gig adalah sistem kerja di mana seseorang bisa bekerja dari satu proyek ke proyek lainnya, tanpa terikat kontrak jangka panjang. Dengan bantuan platform online seperti Gojek,Grab, atau Fiverr, pekerja gig memiliki kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini memberi keuntungan bagi mereka yang mencari pekerjaan sampingan atau ingin lebih mengontrol jam kerja mereka sendiri. Ekonomi gig muncul sebagai respons terhadap perubahan besar dalam teknologi, preferensi kerja, dan dinamika pasar tenaga kerja.
- Ekonomi gig yang sedang trend sekarang ini di sebabkan oleh beberapa faktor berikut ini: a. Perkembangan teknologi digital: Munculnya platform seperti Gojek, Grab, Upwork, dan Freelancer memudahkan pencocokan antara pekerja dan pengguna jasa; Smartphone dan GPS memungkinkan layanan berbasis lokasi dan transaksi instan; b.Krisis ekonomi dan ketidakstabilan kerja: Setelah krisis keuangan global 2008, banyak Perusahaan mengurangi karyawan tetap dan beralih ke tenaga kerja kontrak atau freelance; Pandemi COVID-19 juga mempercepat peralihan ke pekerjaan fleksibel dan jarak jauh; c. Preferensi generasi muda: Generasi milenial dan Gen Z cenderung memilih fleksibilitas dan kebebasan kerja dibandingkan stabilitas kerja konvensional; d. Efisiensi biaya bagi Perusahaan: Perusahaan bisa menghemat biaya operasional karena tidak perlu memberikan tunjangan seperti asuransi atau pensiun kepada pekerja gig; e. Kebutuhan akan layanan on-demand: Konsumen semakin terbiasa dengan layanan cepat dan fleksibel, seperti antar makanan, transportasi, atau jasa desain.
- Regulasi pemerintah indonesia terkait ekonomi gig saat ini masih belum sepenuhnya komprehensif, meskipun ada beberapa upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerja gig. Berikut beberapa regulasi pekerja gig:a. Status Hukum Pekerja Gig: Pekerja gig seperti pengemudi ojol dan freelancer umumnya dianggap sebagai mitra, bukan karyawan tetap. Karena status ini, mereka tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan formal, seperti upah minimum, THR, atau jaminan pensiun; b. Perlindungan Sosial: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tersedia, tapi kepesertaan bersifat sukarela bagi pekerja gig. Platform digital belum diwajibkan untuk mendaftarkan mitra mereka ke program jaminan sosial; c. Regulasi yang Berlaku: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belum secara eksplisit mengatur pekerja gig. Permenaker No. 5 Tahun 2021 mengatur jaminan sosial, tapi tidak mewajibkan platform digital untuk ikut serta.
- UU Pekerja Gig atau Gig Workers Bill 2025 disahkan parlemen Malaysia pada Kamis (28/8/2025). Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, lewat akun resminya di X dan Facebook pada Sabtu (30/8/2025), menyebut UU itu sebagai ”hadiah” bagi anak muda yang bekerja di sektor gig, seperti pengantar makanan dan pengemudi transportasi daring. Gigs Workers Act 2025 memberikan perlindungan bagi pekerja gig dengan menetapkan kewajiban contractingentity, mengatur isi service agreement, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta membentuk Dewan Konsultatif dan Tribunal Pekerja Gig. UU ini mendefinisikan pekerja gig sebagai warga negara atau penduduk tetap Malaysia yang membuat service agreement dengan penyedia platform atau entitas non-platform untuk memberikan layanan dan menerima penghasilan. Service agreement mencakup perjanjian lisan atau tertulis, dan berbeda dari contract of service atau contract of employment dalam hukum ketenagakerjaan tradisional.
- Wakil Ketua V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan secara inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig untuk memberi kepastian hukum terhadap pekerja lepas, menjamin hak dasar seluruh pihak yang terlibat, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih setara. Secara umum, dia mengatakan bahwa RUU Pekerja Gig mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan pekerja yang tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dalam RUU Pekerja Gig ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja. Sejauh ini, dia mengategorikan ada 10 layanan yang masuk kategori pekerja gig dalam RUU tersebut. Adapun 10 layanan tersebut adalah bidang transportasi, pemeranan, kegiatan film, musik, estetika, penerjemahan, jurnalisme, perawatan dan pengobatan, perawatan paliatif, fotografi dan videografi. Rincian jenis-jenis pekerjaanya, yakni meliputi pengemudi berbasis aplikasi, kurir, aktor/aktris, kru film, penyanyi, musisi, komposer, penulis lirik, penata rias, penata rambut, penata gaya, juru bahasa isyarat, penerjemah, transkriber, jurnalis lepas, koresponden, konten kreator, YouTuber, podcaster, hingga fotografer dan videografer. Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor Gig. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis platform digital. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan penghasilan bersih, akses jaminan sosial komprehensif (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), serta kepastian keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja. RUU ini tetap mempertahankan fleksibilitas model kemitraan independen yang menjadi ciri khas sektor Gig, namun di sisi lain mewajibkan pemberi kerja atau platform memberikan perlindungan setara dengan hubungan kerja tradisional.
- **Sumber:**

1. Ekonomi gig dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja. (n.d.). Dalam Ekonomi digital: Dampak dan peluang di era g

2. Ekonomi gig: Peluang dan tantangan di era kerja fleksibel. (n.d.). Jurnal Al-Khairat. Diakses 15 Februari 2026, dari http

3. Hubungan kerja dalam layanan ride-hailing: Studi komparatif implementasi hukum Indonesia dan
4. Menyemai harapan pada era “gig economy.” (2026). Kompas.id. Diakses 16 Februari 2026, dari https://www.kompas.id
5. UU pekerja gig Malaysia disahkan, apa pelajaran bagi Indonesia? (2026). E-Paper Perpustakaan DPR RI. Diakses 15 F
6. Wakil Ketua V DPR usulkan RUU pekerja gig guna kepastian pekerja lepas.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Analisis Media Sosial Litbang Kompas: Problematika Pengemudi Ojek Daring	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20520
Berita	Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital	https://nasional.kompas.com/re \nad/2025/11/13/22333411/anggota \n-dpr-yakin-ruu-pekerja-gig-jam \nin-upah-minimum-sektor-ekonomi \n-digital
Berita	Durasi Masa Kerja Pengemudi Ojol Tak Sebanding dengan Tingkat Pendapatan	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20510
Berita	Ekonomi Gig dan Bayangan Eksploitasi di Balik Pesona Aplikasi	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20097
Berita	Ekonomi Platform: Keseimbangan Bukan Beban	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20527
Berita	Ekonomi ”Gig” dan Bom Waktu Ketenagakerjaan	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20501
Berita	Golkar Sebut RUU Pekerja Gig Sudah Diusulkan Sejak Lama, Bakal Atur Hak-Status	https://news.detik.com/berita/ \nd-8211435/golkar-sebut-ruu-pek \nerja-gig-sudah-diusulkan-sejak \n-lama-bakal-atur-hak-status
Berita	Kondisi Pekerja Gig Dunia Belum Layak, Apa yang Salah?	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20498
Berita	Lonjakan Jumlah Pekerja Gig	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20499
Berita	Mengapa Ekonomi Gig Perlu Diatur di Indonesia?	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20500
Berita	Mengapa Pengemudi Ojol Sulit Keluar dari Lingkaran Kerja Panjang dan Pendapatan Rendah?	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20504
Berita	Menggodok Aturan dan Inisiatif demi Perkuat Kesejahteraan Ojol	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20506
Berita	Menyemai Harapan pada Era ”Gig Economy”	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20528
Berita	Meregulasi Hal yang Tak Pasti di Dunia Ekonomi Gig	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20524
Berita	Narik Tiap Hari, Hak Perlu Dihargai: Rekomendasi untuk RUU Pekerja Platform Indonesia	https://indef.or.id/wp-content \n/uploads/2025/11/Bahan-Brief-R \neport-Pekerja-Gig.pdf
Berita	PEKERJA GIG : Beredar Kabar, Pemerintah Siapkan Draf Perpres Ojol	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20525
Berita	Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Molor	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/kliping/index/detail/id/46816
Berita	Pendapatan Rendah dan Beban Berat Ojol	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20494
Berita	Pengaturan Kemitraan Layak bagi Pekerja Gig Mendesak	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20529
Berita	Pengemudi Ojol, Pekerjaan Sementara yang Terlalu Panjang	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20496
Berita	RUU Pekerja Gig Disiapkan, DPR Bidik Payung Hukum Pekerja Ekonomi Digital	https://money.kompas.com/read/ \n2025/11/12/103705726/ruu-peker \nja-gig-disiapkan-dpr-bidik-pay \nung-hukum-pekerja-ekonomi-digi \ntal
Berita	Seberapa Terbuka Peluang Kerja ”Live Streaming Host”?	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20526
Berita	Survei Litbang Kompas: Bayang-bayang Status Kemitraan Semu pada Pengemudi Ojol	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20521
Berita	Survei Litbang Kompas: ”Overwork” di Jalanan, Potret Rapuhnya Hidup Pengemudi Ojol	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20502
Berita	Survei Litbang ”Kompas”: Realitas dan Harapan Pengemudi Ojek Daring demi Bertahan Hidup	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20493
Berita	UU Pekerja Gig Malaysia Disahkan, Apa Pelajaran bagi Indonesia?	https://perpustakaan.dpr.go.id \n/epaper/index/detail/id/20497

Berita	Waka Komisi V DPR Dorong RUU Pekerja GIG Dibahas, Target Disahkan 2026	https://news.detik.com/berita/ \nd-8209669/waka-komisi-v-dpr-do \nrong-ruu-pekerja-gig-dibahas-t \narget-disahkan-2026?page=2
Berita	Wakil Ketua V DPR usulkan RUU Pekerja Gig guna kepastian pekerja lepas	https://www.antaranews.com/ber \nita/5240589/wakil-ketua-v-dpr- \nusulkan-ruu-pekerja-gig-guna-k \nepastian-pekerja-lepas
Jurnal	Ekonomi Gig Dan Dampaknya Terhadap Pasar Tenaga Kerja	https://www.researchgate.net/p \nrofile/Siprianus-Tefa/publicat \nion/400368769_EKONOMI_DIGITAL_ \nDampak_dan_Peluang_di_Era_Glob \nalisasi/links/698159ba12f83721 \n2a17136f/EKONOMI-DIGITAL-Dampa \nk-dan-Peluang-di-Era-Globalisa \nsi.pdf#page=163
Jurnal	Ekonomi Gig: Peluang Dan Tantangan Di Era Kerja Fleksibel	https://jurnalalkhairat.org/oj \ns/index.php/currency/article/v \niew/321/298
Jurnal	Ekonomi Gig: Peluang Dan Tantangan Di Era Kerja Fleksibel	https://jurnalalkhairat.org/oj \ns/index.php/currency/article/v \niew/321/298
Jurnal	GIG Economy sebagai Sumber Ekonomi Baru Penduduk Kelas Menengah di Jakarta	https://scholarhub.ui.ac.id/cg \ni/viewcontent.cgi?article=1064 \n&context=jekk
Jurnal	Hak Pekerja Di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas dan Kontrak	https://ojs.daarulhuda.or.id/i \nndex.php/MHI/article/view/487/ \n521
Jurnal	Hubungan Kerja dalam Layanan Ride-Hailing: Studi Komparatif Implementasi Hukum Indonesia dan Malaysia	https://ejournal.mahalisan.com \n/index.php/jml/article/view/18 \n/17
Jurnal	Kekosongan Norma Perlindungan Pekerja Gig Economydalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	https://jurnal.mediaakademik.c \nom/index.php/jma/article/view/ \n4488/3335
Jurnal	Konsep Fleksibilitas dalam GIG Worker dan Pengaruhnya Pada Kinerja Perusahaan Jasa: Literature Review	https://ejournal.undip.ac.id/i \nndex.php/jgti/article/view/576 \n04/27731
Jurnal	Penguatan Pelindungan Bagi Pekerja Gig	https://berkas.dpr.go.id/pusak \na/files/info_singkat/Info%20Si \nngkat-XVII-5-I-P3DI-Maret-2025 \n-209.pdf?utm_source=chatgpt.co \nm
Jurnal	Peran Penting Ojol Dalam Mendukung Umkm	https://berkas.dpr.go.id/pusak \na/files/isu_sepekan/Isu%20Sepe \nkan---IV-PUSLIT-Mei-2025-191.p \ndf
Jurnal	Perlindungan Hukum Pekerja Digital Freelance di Era Platform Economy: Analisis Gap Regulasi Ketenagakerjaan dan Rekomendasi Reformasi Normatif	https://ejournal.kalibra.or.id \n/index.php/legalnote/article/v \niew/195/201
Jurnal	PerlindunganHukumTerhadapHak-Hak Pekerja Lepas DalamPerkembangan Gig Economy di Indonesia	http://scriptaintelektual.com/ \ncustodia/article/view/467/381
Jurnal	Recent Development of Legal Framework of Labor Law in Indonesia	https://www.jil.go.jp/english/ \njli/documents/2021/032-09.pdf
Jurnal	Regulating Platform Work in Indonesia: Exploring Legal Options for Workers' Protection	https://journals.kemnaker.go.i \nd/index.php/naker/article/view \n/622
Jurnal	Standard Agreement for Online Transportation Partnership: A Review of Bargaining Positions and Agreement Norms towards a Fair Contract	https://slamultitechpublisher. \nmy.id/index.php/ijla/article/v \niew/99/143
Jurnal	Status Hukum Pekerja Platform Digital Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan	http://jerkin.org/index.php/je \nrkin/article/view/4341
Jurnal	Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi GIG di Sektor Transportasi : Indonesia dan California	https://ejournal.uin-suka.ac.i \nd/syariah/jrh/article/view/380 \n1/2238

Jurnal	The Legal Status of Gig Economy Workers in Indonesia's Digital PlatformIndustry(2022-2025):ProblematikaStatusHukumPekerjaGig Economy dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025)	https://ijler.umsida.ac.id/ind\nex.php/ijler/article/view/1402\nk/1682
Jurnal	Youth Participation in the Gig Economy: A Scoping Review of Socioeconomic and Maqasid Shariah Perspectives	https://www.ejpi.uis.edu.my.ku\nisjournal.com/index.php/ejpi/a\nrticle/view/300/224
Buku	Hukum tenaga kerja: suatu pengantar	https://opac.dpr.go.id/index.p\nhp?p=show_detail&id=32498&keyw\nords=%5C%22hukum+tenaga+kerja%\n5C%22
Buku	JKN dalam Kacamata Pekerja Sektor Informal	https://opac.dpr.go.id/index.p\nhp?p=show_detail&id=39782&keyw\nords=pekerja+lepas
Buku	JKN dalam Kacamata Pekerja Sektor Informal	https://opac.dpr.go.id/index.p\nhp?p=show_detail&id=39782&keyw\nords=pekerja+lepas
Buku	Perlindungan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Indonesia : Ahli Teknologi	https://opac.dpr.go.id/index.p\nhp?p=show_detail&id=39797&keyw\nords=pekerja+lepas
Buku	sosial transportasi online roda dua	https://opac.dpr.go.id/index.p\nhp?p=show_detail&id=35217&keyw\nords=kemitraan
Dokumen	Digital labour platforms and the future of work Towards decent work in the online world	https://www.ilo.org/sites/defa\nult/files/wcmsp5/groups/public\n/%40dgreports/%40dcomm/%40publ\n/documents/publication/wcms_64\n5337.pdf
Dokumen	DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA GIG USULAN INISIATIF SYAIFUL HUDA, M.K.P. /A-22/DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	https://www.hukumonline.com/pu\nsatdata/detail/lt698b125136ac1\n/rancangan-undang-undang-tahun\n-2025/
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur kebijakan upah minimum bagi pekerja	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/161909/pp-no-36-
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	https://www.dpr.go.id/dokumen/\njdih/undang-undang/detail/Kese\nlamatan-Kerja-641
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	https://www.dpr.go.id/dokumen/\njdih/undang-undang/detail/Info\nrmasi-Dan-Transaksi-Elektronik\n-138
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/43013
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	https://www.dpr.go.id/dokumen/\njdih/undang-undang/detail/Peny\nelesaian-Perselisihan-Hubungan\n-Industrial-2
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS	https://www.dpr.go.id/dokumen/\njdih/undang-undang/detail/Bada\nn-Penyelenggara-Jaminan-Sosial\n-260
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	https://www.dpr.go.id/dokumen/\njdih/undang-undang/detail/Sist\nem-Jaminan-Sosial-Nasional-41
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	https://peraturan.bpk.go.id/De\ntails/246523/uu-no-6-tahun-202\n3